



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan dilaksanakan dengan seadil adilnya sesuai Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

#### Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.212.806.028.009,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp99.438.272.477,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.312.244.300.486,00 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah:

1. semula	Rp2.129.806.028.009,00;
2. bertambah	<u>Rp14.871.992.455,00;</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.144.678.020.464,00;

b. belanja Daerah:

1. semula	Rp2.212.806.028.009,00;
2. bertambah	<u>Rp99.438.272.477,00;</u>
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.312.244.300.486,00;

c. Pembiayaan Daerah:	
1. penerimaan Pembiayaan:	
a) semula	Rp100.000.000.000,00;
b) bertambah	<u>Rp74.566.280.022,00;</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp174.566.280.022,00;
2. pengeluaran Pembiayaan:	
a) semula	Rp17.000.000.000,00;
b) berkurang	<u>Rp10.000.000.000,00;</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp7.000.000.000,00;
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp167.566.280.022,00;
sisanya lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp00,00;

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah:	
1. semula	Rp562.314.237.237,00;
2. bertambah	<u>Rp17.795.040.709,00;</u>
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp580.109.277.946,00;
b. pendapatan transfer:	
1. semula	Rp1.567.491.790.772,00;
2. berkurang	<u>Rp2.923.048.254,00;</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.564.568.742.518,00;
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:	
1. semula	Rp0,00;
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00;</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp0,00;

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah:

- |                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. semula                             | Rp355.012.627.000,00;      |
| 2. bertambah                          | <u>Rp2.187.373.000,00;</u> |
| jumlah pajak Daerah setelah perubahan | Rp357.200.000.000,00;      |

b. Retribusi Daerah:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. semula                                 | Rp113.938.009.694,00;       |
| 2. bertambah                              | <u>Rp17.738.197.530,00;</u> |
| jumlah retribusi Daerah setelah perubahan | Rp131.676.207.224,00;       |

c. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. semula  | Rp42.607.000.568,00;       |
| 2. bertambah   | <u>Rp1.645.244.295,00;</u> |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp46.252.244.863,00;       |

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. semula  | Rp50.756.599.975,00;       |
| 2. berkurang   | <u>Rp3.775.774.116,00;</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp46.980.825.859,00;       |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer Pemerintah Pusat:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. semula  | Rp1.461.945.350.000,00;     |
| 2. berkurang                                       | <u>Rp11.620.881.000,00;</u> |
| jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp1.450.324.469.000,00;     |

b. transfer antar daerah:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. semula                                      | Rp105.546.440.772,00;      |
| 2. bertambah                                   | <u>Rp8.697.832.746,00;</u> |
| jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp114.244.273.518,00;      |

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- |  |                |
|--|----------------|
| a. pendapatan hibah:   |                |
| 1. semula  | Rp0,00;        |
| 2. bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00;</u> |
| jumlah pendapatan hibah setelah perubahan  | Rp0,00;        |
| b. dana darurat  |                |
| 1. semula  | Rp0,00;        |
| 2. bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00;</u> |
| jumlah dana darurat setelah perubahan  | Rp0,00;        |
| c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:    |                |
| 1. semula  | Rp0,00;        |
| 2. bertambah/(berkurang)   | <u>Rp0,00;</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Rp0,00;        |

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. belanja operasi:                            |                             |
| 1. semula                                      | Rp1.714.144.721.791,00;     |
| 2. berkurang                                   | <u>Rp3.138.339.366,00;</u>  |
| jumlah belanja operasi setelah perubahan       | Rp1.711.006.382.425,00;     |
| b. belanja modal:                              |                             |
| 1. semula                                      | Rp161.633.619.072,00;       |
| 2. bertambah                                   | <u>Rp36.015.103.491,00;</u> |
| jumlah belanja modal setelah perubahan         | Rp197.648.722.583,00;       |
| c. belanja tidak terduga:                      |                             |
| 1. semula                                      | Rp6.971.212.146,00;         |
| 2. berkurang                                   | <u>Rp5.917.375.398,00;</u>  |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp1.053.836.748,00;         |

d. belanja transfer	
1. semula	Rp330.056.475.000,00;
2. bertambah	<u>Rp72.478.883.750,00;</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp402.535.358.750,00;

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:	
1. semula	Rp963.076.119.041,00;
2. berkurang	<u>Rp62.987.680.719,00;</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp900.088.438.322,00;
b. belanja barang dan jasa:	
1. semula	Rp696.629.948.677,00;
2. bertambah	<u>Rp17.961.620.676,00;</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp714.591.569.353,00;
c. belanja bunga:	
1. semula	Rp0,00;
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00;</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00;
d. belanja subsidi:	
1. semula	Rp756.864.073,00;
2. berkurang	<u>Rp162.864.073,00;</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp594.000.000,00;
e. belanja hibah:	
1. semula	Rp46.336.790.000,00;
2. bertambah	<u>Rp34.450.934.750,00;</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp80.787.724.750,00;
f. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp7.345.000.000,00;
2. bertambah	<u>Rp7.599.650.000,00;</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp14.944.650.000,00;

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

1. semula	Rp0,00;
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00;</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp0,00;

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula	Rp46.806.135.762,00;
2. bertambah	<u>Rp24.236.687.148,00;</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp71.042.722.910,00;

c. belanja modal gedung dan bangunan:

1. semula	Rp38.132.881.000,00;
2. bertambah	<u>Rp9.499.370.900,00;</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung	Rp47.632.251.900,00;

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:

1. semula	Rp73.299.080.500,00;
2. berkurang	<u>Rp2.292.178.900,00;</u>
jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp71.006.901.800,00;

e. belanja modal aset tetap lainnya:

1. semula	Rp3.340.521.810,00;
2. bertambah	<u>Rp4.464.324.343,00;</u>
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp7.804.846.153,00;

f. belanja modal aset lainnya:

1. semula	Rp55.000.000,00;
2. bertambah	<u>Rp107.000.000,00;</u>
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp162.000.000,00;

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp6.971.212.146,00;
b. berkurang	<u>Rp5.917.375.398,00;</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp1.053.836.748,00;

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil	
1. semula	Rp27.206.562.000,00;
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.300.674.000,00;</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp52.507.236.000,00;
b. belanja bantuan keuangan	
1. semula	Rp302.849.913.000,00;
2. bertambah	<u>Rp47.178.209.750,00;</u>
jumlah belanja keuangan setelah perubahan	Rp350.028.122.750,00;

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:	
1. semula	Rp100.000.000.000,00;
2. bertambah	<u>Rp74.566.280.022,00;</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp174.566.280.022,00;
b. pengeluaran pembiayaan:	
1. semula	Rp17.000.000.000,00;
2. berkurang	<u>Rp10.000.000.000,00;</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp7.000.000.000,00;

## Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
    1. semula Rp100.000.000.000,00;
    2. bertambah Rp74.566.280.022,00;
 jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp174.566.280.022,00;
  - b. pencairan dana cadangan:
    1. semula Rp0,00;
    2. bertambah/(berkurang) Rp0,00;
 jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
    1. semula Rp0,00;
    2. bertambah/(berkurang) Rp0,00;
 jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah:
    1. semula Rp0,00;
    2. bertambah/(berkurang) Rp0,00;
 jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah:
    1. semula Rp0,00;
    2. bertambah/(berkurang) Rp0,00;
 jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00;

f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1. semula	Rp0,00;
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00;</u>
	jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00;
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:	
a.	pembentukan dana cadangan	
	1. semula	Rp0,00;
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00;</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00;
b.	penyertaan modal Daerah	
	1. semula	Rp17.000.000.000,00;
	2. berkurang	<u>Rp10.000.000.000,00;</u>
	jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp7.000.000.000,00;
c.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	1. semula	Rp0,00;
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00;</u>
	jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00;
d.	pemberian pinjaman Daerah	
	1. semula	Rp0,00;
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00;</u>
	jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0,00;
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1. semula	Rp0,00;
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00;</u>
	jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp0,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
  - d. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran Kabupaten Sukoharjo;
  - e. Lampiran V : rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
  - g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;
  - h. Lampiran VII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja perangkat Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
  - j. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - k. Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
  - l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah;
  - m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Daerah;
  - n. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun jamak;
  - o. Lampiran XV : daftar dana cadangan Daerah; dan
  - p. Lampiran XVI : daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI SUKOHARJO,  
  
ETIK SURYANI



Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,  
  
ABDUL HARIS WIDODO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-220/2025)



KABUPATEN SUKOHARJO  
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>562.314.237.237,00</b>	<b>580.109.277.946,00</b>	<b>17.795.040.709,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	355.012.627.000,00	357.200.000.000,00	2.187.373.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	113.938.009.694,00	131.676.207.224,00	17.738.197.530,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.607.000.568,00	44.252.244.863,00	1.645.244.295,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.756.599.975,00	46.980.825.859,00	-3.775.774.116,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.567.491.790.772,00</b>	<b>1.564.568.742.518,00</b>	<b>-2.923.048.254,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.461.945.350.000,00	1.450.324.469.000,00	-11.620.881.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.546.440.772,00	114.244.273.518,00	8.697.832.746,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.129.806.028.009,00</b>	<b>2.144.678.020.464,00</b>	<b>14.871.992.455,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.714.144.721.791,00</b>	<b>1.711.006.382.425,00</b>	<b>-3.138.339.366,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	963.076.119.041,00	900.088.438.322,00	-62.987.680.719,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.629.948.677,00	714.591.569.353,00	17.961.620.676,00
5.1.04	Belanja Subsidi	756.864.073,00	594.000.000,00	-162.864.073,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.336.790.000,00	80.787.724.750,00	34.450.934.750,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.345.000.000,00	14.944.650.000,00	7.599.650.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>161.633.619.072,00</b>	<b>197.648.722.563,00</b>	<b>36.015.103.491,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.806.135.762,00	71.042.722.910,00	24.236.587.148,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.132.881.000,00	47.632.251.900,00	9.499.370.900,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.299.080.500,00	71.006.901.600,00	-2.292.178.900,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.340.521.810,00	7.804.846.153,00	4.464.324.343,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	55.000.000,00	162.000.000,00	107.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.971.212.146,00</b>	<b>1.053.836.748,00</b>	<b>-5.917.375.398,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.971.212.146,00	1.053.836.748,00	-5.917.375.398,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>330.056.475.000,00</b>	<b>402.535.358.750,00</b>	<b>72.478.883.750,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	27.206.562.000,00	52.507.236.000,00	25.300.674.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	302.849.913.000,00	350.028.122.750,00	47.178.209.750,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.212.806.028.009,00</b>	<b>2.312.244.300.486,00</b>	<b>99.438.272.477,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-83.000.000.000,00</b>	<b>-167.566.280.022,00</b>	<b>-84.566.280.022,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>174.566.280.022,00</b>	<b>74.566.280.022,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	100.000.000.000,00	174.566.280.022,00	74.566.280.022,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	17.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	17.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-10.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>-10.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>83.000.000.000,00</b>	<b>167.566.280.022,00</b>	<b>84.566.280.022,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

